

■ Sosialisasi Pilgub Dinilai Kurang

KPU Didesak Optimalkan Debat Publik

DEMAK - Sosialisasi KPU terkait pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2018 dinilai kurang atau belum optimal. Guna meningkatkan angka partisipasi pemilih, KPU didesak memaksimalkan agenda debat publik untuk mengenalkan detail kedua paslon kepada masyarakat.

Di sela acara Sosialisasi Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD Pemilu 2019 oleh KPU Demak, mantan Ketua Bawaslu RI, Nur Hidayat Sarbini menuturkan, biaya Pilgub Jateng 2018 senilai Rp 1,3 triliun bukanlah anggaran yang kecil. Maka itu harus diimbangi dengan besarnya angka partisipasi pada hari pencoblosan agar nilai manfaat pemilu sebagai media

demokrasi rakyat tercapai.

Sementara berdasarkan hasil pengamatannya di beberapa kabuoaaten/kota di Jateng, pemasangan APK oleh KPU disebutnya kurang atau belum optimal. Alasannya, banyak di antaranya dipasang di lokasi yang kurang pas.

"Banyak spanduk dipasang di lokasi yang viewnya kurang strategis sehingga tidak bisa terlihat optimal oleh mas-

asyarakat. Selain itu APK hanya berisi gambar paslon, sementara profil dan misi visi tidak dicantumkan," ujarnya, Rabu (18/4).

Maka itu di sisa waktu sekitar dua bulan menuju hari pencoblosan pada 27 Juni, KPU beserta jajarannya ke bawah didesak mengoptimalkan agenda debat publik yang masih tersisa dua kali. Seperti menyelenggarakan acara nonton bareng, sehingga masyarakat bisa mengenali benar paslon yang akan mereka pilih.

Di samping itu, lanjutnya, pemma juga memiliki peran untuk membantu sosialisasi pilgub. Dengan anggaran daerah yang dimiliki, pemma bisa melibatkan LSM, ormas bahkan media massa menyosialisasikan pilgub sehingga bisa membantu meningkatkan ang-



Foto: suti jati
Nur Hidayat Sarbini

ka partisipasi pemilih.

Mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang di luar negeri disebutnya setara senator, menurut Nur Hidayat Sarbini tak bisa bertindak sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meski ujung-ujungnya sama

yakni memperjuangkan masyarakat di daerah, namun seorang calon anggota DPD tugasnya lebih berat karenanya harus pandai mengayakan fungsi.

Sementara Ketua KPU Demak Mahmudi menjelaskan, Pemilu 2019 dijadwalkan pelaksanaannya pada 17 April 2019. Meski masih kurang 264 hari menuju hari pemungutan suara, namun sejumlah tahapan sudah dilaksanakan. Di antaranya pendaftaran dan klarifikasi parpol peserta pemilu, serta pembentukan PPK dan PPS.

Terkait pendaftaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diambil setiap provinsi adalah empat calon yang terbesar dukungannya, sudah dimulai penyerahan bakal calon dukungan. Untuk Pulau Jawa sangat ketat persaingan-

nya.

"Bahkan tokoh masyarakat asal Demak bisa mendaftarkan diri, asalkan mengantongi minimal 1.000.000 massa penduduk, yang diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan. Sedangkan untuk pendaftaran calon anggota DPRD dimulai pada Juni 2018," kata Mahmudi.

Untuk daerah pemilihan (dapil) 1 Kabupaten Demak, yakni Kecamatan Demak, Wonosalam, Dempet, dan Kebon Agung ada kuota 12 kursi. Dapil 2 (Wedung dan Bonang) ada delapan kursi. Dapil 3 (Gajah, Karanganyar dan Mijen) delapan kursi. Dapil 4 (Kragawen dan Mranggen) ada 11 kursi. Serta Dapil 5 (Sayung, Guntur dan Karangtengah) juga 11 kursi. ■